



Journal of Human And Education
Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 71-77
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Identifikasi Lapangan Dan Monitoring Evaluasi Koperasi Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi Di Wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya

Adira Kania Ainnindya¹, Kustini Kustini²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: 22012010040@upnjatim.ac.id

Abstrak

Koperasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam membangun ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat langsung kepada para anggotanya. Namun di balik potensi tersebut, banyak koperasi yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan operasionalnya. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan yang dihadapi oleh koperasi adalah masih rendahnya pelaporan kegiatan, khususnya dalam hal Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan sarana vital dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan demi keberlangsungan koperasi. Program identifikasi lapangan dan monitoring evaluasi koperasi Kota Surabaya ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa koperasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih signifikan kepada para anggotanya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa proses identifikasi lapangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi. Selain itu, pelatihan dan pendidikan pengelolaan koperasi mengenai pentingnya pelaporan keuangan yang transparan juga perlu ditingkatkan. Monitoring yang dilakukan secara berkala dapat memberikan data penting bagi pengambilan keputusan strategis yang berbasis bukti.

Kata Kunci: *Koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Monitoring, Transparansi.*

Abstract

Cooperatives in Indonesia have a very important role in supporting the community's economy, especially in building a community-based economy that provides direct benefits to its members. However, behind this potential, many cooperatives face various challenges in their management and operations. One of the significant problems faced by cooperatives is the low level of activity reporting, particularly in terms of the Annual Members Meeting (RAT), which is a vital means of evaluating and making decisions for the sustainability of cooperatives. This field identification and monitoring evaluation program of Surabaya City cooperatives was implemented through a series of structured and systematic stages to ensure that cooperatives can function effectively and provide more significant benefits to their members. The results of this activity indicate that the field identification process is an important step to improve the quality of cooperative management. It is also important to improve cooperative management training and education on the importance of transparent financial reporting. Monitoring carried out periodically can provide important data for evidence-based strategic decision-making.

Keywords: *Cooperatives, Annual Members Meeting, Monitoring, Transparency.*

PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai organisasi ekonomi berbasis kerakyatan, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kebersamaan, solidaritas, dan kemandirian. Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, koperasi memiliki tantangan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang baik menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional (Putri & Rizaldi, 2021). Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan strategi pemasaran koperasi. Strategi pemasaran yang efektif dapat membantu koperasi menjangkau lebih banyak anggota dan pelanggan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan yang ditawarkan. (Singgih & Priyono, 2022) menekankan pentingnya inovasi dalam pemasaran untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Digitalisasi pemasaran menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Manajemen keuangan juga merupakan elemen kunci dalam keberhasilan koperasi. Pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan telah terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional koperasi. Studi oleh (Wasiaturrahma et al., 2020) menunjukkan bahwa koperasi yang mendapatkan pendampingan dalam manajemen keuangan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, termasuk dalam hal pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengelolaan dana. Hal ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi bagi keberlanjutan koperasi.

Kinerja koperasi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari anggota. (Almaududi et al., 2024) mengidentifikasi bahwa tingkat partisipasi anggota dapat ditingkatkan melalui pelayanan yang berkualitas dan kinerja pengurus yang profesional. Anggota yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih berkomitmen dalam mendukung koperasi. Oleh karena itu, pengurus koperasi harus memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola hubungan dengan anggota dan membangun rasa percaya. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan manajemen koperasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi. (Ayuningtyas & Rudiantono, 2021) mencatat bahwa pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu koperasi untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan staf dalam mengelola organisasi. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan penggunaan teknologi informasi. Dengan pelatihan yang memadai, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saingnya di pasar. Tantangan lain yang dihadapi koperasi adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dalam era digital, koperasi perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola operasional dan meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. (Widodo et al., 2022) menyoroti bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung manajemen koperasi, mulai dari pencatatan keuangan hingga pemasaran digital. Teknologi ini juga memungkinkan koperasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan anggota dan perkembangan pasar.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai pilar dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan. Sebagai entitas yang dibangun dengan asas kebersamaan dan gotong-royong, koperasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya melalui pengelolaan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Namun, di tengah perannya yang penting, koperasi di Indonesia kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengelolaan dan pencapaian tujuan utama organisasi (Nugraha & Santoso, 2020).

Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pelaksanaan kewajiban administratif, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT merupakan forum tertinggi dalam struktur koperasi yang memungkinkan anggota untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus, menyusun rencana kerja, serta mengambil keputusan strategis terkait keberlanjutan organisasi. Tidak adanya pelaksanaan RAT secara rutin atau tepat waktu dapat mengakibatkan menurunnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan koperasi. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kepercayaan anggota terhadap pengurus, tetapi juga membatasi peluang koperasi untuk berkembang secara berkelanjutan (Pratama & Hadi, 2021).

Wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya merupakan salah satu daerah dengan jumlah koperasi terdaftar yang cukup banyak, yaitu mencapai 58 koperasi menurut data dari Dinas Koperasi setempat. Meskipun

demikian, banyak koperasi di wilayah ini yang belum mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif. Survei lapangan menunjukkan bahwa sejumlah koperasi tidak aktif dalam menyelenggarakan RAT dan melaporkan kegiatan operasionalnya. Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas manajemen, rendahnya partisipasi anggota, dan minimnya dukungan dari instansi terkait. Masalah ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih terkoordinasi untuk mengatasi kelemahan struktural dalam pengelolaan koperasi (Rahmawati & Susanto, 2022).

Program identifikasi lapangan dan monitoring evaluasi koperasi di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya dilaksanakan untuk memahami kondisi aktual koperasi sekaligus memberikan masukan strategis bagi pengelolaannya. Proses ini meliputi serangkaian tahapan, mulai dari persiapan dan perencanaan, pelaksanaan identifikasi lapangan, hingga pelaporan hasil dan tindak lanjut. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan keaktifan koperasi dalam pelaksanaan kewajibannya, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat tata kelola koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan anggota.

Pandangan sebelumnya menegaskan bahwa koperasi yang rutin melaksanakan monitoring dan RAT memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi (Setyawan et al., 2019). Selain itu, program pelatihan dan pendampingan koperasi dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi pengurus, memperbaiki sistem manajerial, dan mendorong inovasi di bidang operasional. Oleh karena itu, upaya sistematis dalam mengidentifikasi permasalahan koperasi dan memberikan solusi berbasis bukti sangat diperlukan untuk memastikan koperasi dapat berfungsi secara optimal.

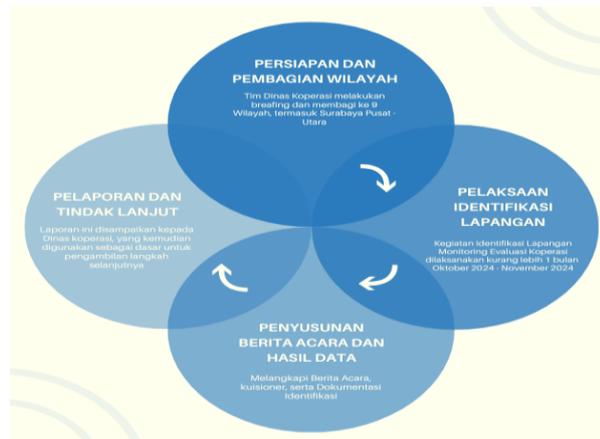
Melalui program ini, diharapkan koperasi di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya dapat lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif sehingga mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi anggotanya. Dengan kolaborasi yang erat antara koperasi, anggota, dan Dinas Koperasi, keberlanjutan koperasi dapat terjamin, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

METODE

Program identifikasi lapangan dan monitoring evaluasi koperasi Kota Surabaya dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan koperasi dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Tahapan pertama adalah persiapan dan perencanaan, yang mencakup penyusunan rencana kerja yang jelas dan pengumpulan data awal mengenai koperasi yang terdaftar di wilayah tersebut, yaitu pada wilayah Pusat – Utara Kota Surabaya sebanyak 58 koperasi. Dalam tahap ini, tim Dinas Koperasi Kota Surabaya merancang strategi pelaksanaan yang meliputi instrumen yang digunakan serta sasaran yang ingin dicapai.

Tahap berikutnya adalah identifikasi lapangan, yang dilakukan dengan mengunjungi masing-masing koperasi untuk memverifikasi status operasional dan memastikan koperasi memenuhi kewajiban administratif, terutama dalam hal pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada tahap ini, tim pengelola melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan anggota koperasi, serta mengumpulkan data berita acara dan kuisioner yang berfungsi untuk mendata dan menilai keaktifan koperasi dan kinerja pengurus dalam menjalankan kewajiban mereka. Survei lapangan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dan mendalami kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam operasional sehari-hari.

Pelaporan dan tindak lanjut merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan program ini. Hasil identifikasi dan monitoring disusun dalam laporan berita acara yang mencakup hasil keaktifan Koperasi dalam pelaporan Dinas terhadap kinerja koperasi dan temuan-temuan yang didapatkan selama proses lapangan. Laporan ini disampaikan kepada Dinas koperasi, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan langkah selanjutnya. Setelah laporan diserahkan, Dinas Koperasi akan memberikan arahan dan dukungan kepada koperasi yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut dalam aspek manajerial dan administrasi. Dinas Koperasi juga dapat menonaktifkan Data ODS Koperasi apabila terdapat koperasi yang tidak aktif dan lama tidak RAT (Rapat Anggota Tahunan).



Gambar 1 : Proses Pelaksanaan

HASIL

Kegiatan identifikasi lapangan dan monitoring evaluasi koperasi di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis. Proses ini dimulai dari Tengah bulan Oktober yaitu tahap persiapan dan perencanaan, diikuti oleh identifikasi lapangan, serta pelaporan dan tindak lanjut. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi di wilayah tersebut dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi para anggotanya. Pada tahap persiapan dan perencanaan, tim Dinas Koperasi Kota Surabaya menyusun rencana kerja yang mencakup pengumpulan data awal mengenai 58 koperasi yang terdaftar di wilayah Pusat-Utara. Strategi pelaksanaan dirancang dengan menggunakan instrumen survei dan kuisisioner yang relevan untuk mengukur keaktifan dan kinerja masing-masing koperasi. Persiapan ini memastikan bahwa setiap langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 2 : Rapat Persiapan dan Pembagian Wilayah

Selanjutnya, tahap identifikasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi masing-masing koperasi untuk memverifikasi status operasional dan memastikan bahwa koperasi memenuhi kewajiban administratif, terutama dalam hal pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil koperasi yang secara rutin menyelenggarakan RAT dan melaporkan keuangan dengan transparan. Sebagian besar koperasi menghadapi tantangan signifikan seperti kurangnya pelaksanaan RAT tepat waktu, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Faktor utama yang menghambat pelaksanaan RAT adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang pentingnya pelaporan keuangan yang transparan. Banyak pengurus koperasi, terutama di koperasi kecil, belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk menjalankan kewajiban administratif secara efektif. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan anggota terhadap pengurus.



Gambar 3. Pelaksanaan Identifikasi Lapangan dan Monitoring Evaluasi Koperasi



Gambar 4. Pelaksanaan Identifikasi Lapangan dan Monitoring Evaluasi Koperasi

Tahap pelaporan dan tindak lanjut merupakan langkah akhir dalam program ini, di mana hasil identifikasi dan monitoring disusun dalam laporan berita acara. Laporan ini mencakup evaluasi keaktifan koperasi dalam pelaporan kepada Dinas Koperasi serta temuan-temuan yang diperoleh selama proses lapangan. Berdasarkan laporan tersebut, Dinas Koperasi memberikan arahan dan dukungan kepada koperasi yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut, baik dalam aspek manajerial maupun administrasi. Selain itu, Dinas Koperasi juga berhak untuk menonaktifkan data ODS Koperasi apabila terdapat koperasi yang tidak aktif dan belum menyelenggarakan RAT dalam jangka waktu tertentu.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa koperasi yang aktif dalam menyelenggarakan RAT memiliki tata kelola yang lebih baik dan transparan. Mereka mampu mendistribusikan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil serta melaksanakan program peningkatan kesejahteraan anggota dengan lebih efektif. Sebaliknya, koperasi yang tidak aktif sering kali gagal memenuhi tujuan utama pendiriannya, baik dari segi finansial maupun sosial. Partisipasi anggota yang rendah dalam RAT juga mengindikasikan kurangnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan strategis, yang berdampak negatif pada keberlanjutan koperasi. Secara keseluruhan, proses identifikasi lapangan dan monitoring evaluasi koperasi yang dilakukan di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya memberikan wawasan penting mengenai kondisi aktual koperasi. Implementasi solusi yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing koperasi, sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi kesejahteraan anggotanya serta mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan koperasi yang ditemukan selama proses identifikasi lapangan di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya, beberapa alternatif solusi yang dapat diimplementasikan dari Dinas Koperasi untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Manajerial Internal Koperasi
2. Pendampingan Intensif dari Dinas Koperasi pada Koperasi
3. Digitalisasi Proses Operasional yang memudahkan dalam pencatatan keuangan dan administrasi untuk RAT (Rapat Anggota Tahunan)
4. Dinas Koperasi akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban koperasi
5. Meningkatkan kesadaran anggota koperasi mengenai hak dan kewajiban mereka melalui

sosialisasi berkala

Solusi ini diharapkan mampu membantu koperasi di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya untuk lebih aktif, transparan, dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi para anggotanya.



Gambar 5. Pendampingan dan Pengawasan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya



Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi Dinas Koperasi Kota Surabaya

SIMPULAN

Kegiatan identifikasi lapangan dan monitoring evaluasi terhadap koperasi di wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi koperasi serta tantangan yang dihadapinya. Temuan utama menunjukkan bahwa banyak koperasi masih menghadapi kendala serius dalam pengelolaan, baik dari aspek manajemen, partisipasi anggota, maupun transparansi dan akuntabilitas keuangan. Meski demikian, koperasi yang secara konsisten menjalankan prinsip dasar, seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal keaktifan operasional dan manfaat yang diberikan kepada anggota.

Salah satu permasalahan yang menonjol adalah rendahnya tingkat pelaporan dan pelaksanaan RAT di banyak koperasi. Dari total 58 koperasi yang disurvei, hanya 40% yang secara rutin memenuhi kewajiban ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kapasitas manajerial pengurus, rendahnya kesadaran anggota terhadap hak dan kewajibannya, serta minimnya pendampingan dari Dinas Koperasi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa banyak koperasi belum sepenuhnya mampu menjalankan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagai organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi masalah utama. Beberapa koperasi menunjukkan kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus tentang tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, banyak koperasi masih mengandalkan sistem manual dalam administrasi, yang memperbesar risiko kesalahan pencatatan dan memperlambat proses pelaporan. Digitalisasi menjadi salah satu solusi strategis yang dapat membantu koperasi meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi keuangan atau platform komunikasi, koperasi dapat mempermudah pengelolaan operasional dan meningkatkan partisipasi anggota. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan pelatihan dan pendampingan intensif agar pengurus koperasi mampu menggunakannya secara efektif.

Kesadaran anggota terhadap hak dan kewajibannya juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi. Koperasi yang anggotanya aktif berpartisipasi dalam kegiatan, seperti RAT, cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik dan manfaat ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya keterlibatan anggota dalam koperasi harus menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas koperasi. Secara keseluruhan, kegiatan monitoring ini menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dan Dinas Koperasi. Pendampingan berkelanjutan, pelatihan pengelolaan, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewajiban koperasi merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan koperasi mampu memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, koperasi di Surabaya dapat memperkuat perannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaududi, S., Sembiring, B., & Hutabarat, Z. S. (2024). Analisis Kinerja Pengurus Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 1861–1864.
- Ayuningtyas, F. N., & Rudiantono, Y. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Koperasi menuju Koperasi yang Profesional. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(2), 126–129. <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i2.85>
- Edylia Putri, N., & Rizaldi, A. (2021). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Era Globalisasi. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 528–535. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.85>
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). *Www.Penerbitwidina.Com Www.Penerbitwidina.Com*.
- Mochammad Singgih, & Joko Priyono. (2022). Analisis Pengembangan Strategi Pemasaran Koperasi Karyawan (KopKar) Untag Surabaya. *Journal of Research and Technology*, 8(1), 15–28. <https://doi.org/10.55732/jrt.v8i1.628>
- Wasiaturrahma, C, S., D, H., & S. R. Ajija, S. R. (2020). Improving The Cooperative Performance Through Financial Management Assistance in Koperasi 64 Surabaya. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 256–267.
- Nugraha, D., & Santoso, H. (2020). Peran Koperasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Pratama, B., & Hadi, W. (2021). Evaluasi Fungsi Dasar Koperasi di Indonesia: Studi Kasus Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 12(3), 245–256.
- Rahmawati, D., & Susanto, Y. (2022). Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Koperasi melalui Pengawasan Dinas. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press.
- Setyawan, T., et al. (2019). Hubungan Tata Kelola Koperasi dengan Tingkat Keberhasilan Operasional di Indonesia. *Jurnal Koperasi dan Pembangunan*, 10(1), 35–48.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.